

ABSTRAK

Eva Dwi Lestari. NIM 126103203242, Pelaksanaan Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Kabupaten Blitar Tentang Penanggulangan HIV/AIDS Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immunodeficiency Syndrome* dan Infeksi Menular Seksual, Program Studi Hukum Tata Negara, Jurusan Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2024, Pembimbing ; Amrin Nurfieni, S.ST., M.H.

Kata Kunci : Tanggung Jawab Hukum, Pemerintah Kabupaten, Penanggulangan HIV/AIDS.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya lonjakan kasus HIV/AIDS di Kabupaten Blitar selama tahun 2022 ditemukan kasus baru sebanyak 140 kasus sementara pada pertengahan tahun 2023 dari januari-juli sudah ditemukan 114 kasus. Dengan melonjaknya kasus HIV/AIDS diperlukan peran pemerintah kabupaten blitar untuk meningkatkan derajat kesehatan seluruh anggota masyarakat. Strategi pencegahan dan tanggung jawab pemerintah daerah dengan kelompok terkait serta masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar tercapai upaya menanggulangi penyakit HIV/AIDS secara maksimal dan membuahkan penurunan kasus HIV/AIDS.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Pelaksanaan Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Kabupaten Blitar tentang penanggulangan HIV/AIDS berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2022 Tentang *Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immunodeficiency Syndrome* dan Infeksi Menular Seksual ? 2) Bagaimana kendala yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Blitar dalam pelaksanaan tanggung jawab hukum tentang Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Blitar? 3) Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab hukum Pemerintah Kabupaten Blitar tentang Penanggulangan HIV/AIDS Menurut *Fiqh Siyashah*? Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk menganalisis pelaksanaan tanggung jawab hukum Pemerintah Kabupaten Blitar tentang Penanggulangan HIV/AIDS Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2022 Tentang *Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immunodeficiency Syndrome* dan Infeksi Menular Seksual. 2) Untuk menganalisis kendala yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Blitar dalam pelaksanaan tanggung jawab hukum Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Blitar. 3) Untuk menganalisis pelaksanaan tanggung jawab hukum Pemerintah Kabupaten Blitar tentang Penanggulangan HIV/AIDS menurut *Fiqh Siyashah*.

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode Kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi. Teknik Analisa data menggunakan analisis data Miles dan Huberman yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Triangulasi digunakan untuk pengecekan keabsahan data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pelaksanaan Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Kabupaten Blitar dalam melakukan Penanggulangan HIV AIDS sudah

melakukan beberapa amanat sesuai dengan tanggung jawab hukum berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Penanggulangan HIV, AIDS dan IMS yakni dibuktikan dengan melakukan kegiatan epidemiologi, surveilans, pencatatan dan laporan, pemantauan dan evaluasi, kegiatan-kegiatan yang bersifat meningkatkan layanan dan mengadakan pelatihan medis, bekerja sama dengan badan non pemerintah, memberikan saranaprasarana yang memadai untuk melakukan pelayanan kesehatan. Tetapi ada salah satu amanat yang belum dilakukan yaitu belum ada Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati terkait penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Blitar. 2) Kendala yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Blitar dalam pelaksanaan tanggung jawab hukum Pemerintah Kabupaten Blitar tentang penanggulangan HIV AIDS bisa dari segi pelayanan dan masyarakat. Pertama, segi pelayanan ini berupa keterlambatan logistik seperti belum menyeluruh pelatihan untuk tenaga kesehatan dan penganggaran yang sedikit. Kedua, dari segi masyarakat ini berupa masih adanya pikiran bahwa pengobatan HIV AIDS melalui pengobatan alternatif serta adanya stigma diskriminasi masyarakat terhadap ODHIV. 3) Dalam tinjauan Fiqh siyasah, Pelaksanaan pelaksanaan tanggung jawab hukum Pemerintah Kabupaten Blitar tentang penanggulangan HIV AIDS sesuai dengan *Siyasah Tanfiziyyah* hal ini ditunjukkan dengan *siyasah tanfiziyyah* yang membahas tentang hubungan pemimpin dengan rakyatnya. Dan pemimpin yang mengatur segala kepentingan umum. Tujuan utama dari semua kebijakan dan tindakan seorang pemimpin adalah untuk menciptakan kemaslahatan rakyat dengan sebaik-baiknya, serta menghilangkan atau meminimalisir segala bentuk kerugian (mafsadat), dengan menyediakan fasilitas dan mekanisme pendukung yang sesuai. Jika seorang pemimpin tidak memperhatikan kemaslahatan rakyat dalam sebuah kebijakan atau keputusan, serta tidak berusaha mencari cara atau mekanisme untuk mewujudkannya, maka tindakan atau keputusannya menjadi batil, dan ia harus menanggung konsekuensi atau resikonya. Maka kegiatan penanggulangan HIV AIDS di Kabupaten Blitar, merupakan bagian penting dari Pemerintah Kabupaten Blitar yang baik dan berfokus terhadap kepentingan Masyarakat dalam permasalahan HIV AIDS.

ABSTRACT

Eva Dwi Lestari. NIM 126103203242, Implementation of the Legal Responsibility of the Blitar Regency Government Regarding HIV/AIDS Control Based on Ministerial Regulation Number 23 of 2022 concerning the Management of *Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immunodeficiency Syndrome* and Sexually Transmitted Infections, Constitutional Law Study Program, Department of Sharia, Faculty of Sharia and Law, Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung State Islamic University, 2024, Supervisor; Amrin Nurfieni, S.ST., M.H.

Keywords: Legal Responsibility, District Government, HIV/AIDS Control.

This research is based on the surge in HIV/AIDS cases in Blitar Regency during 2022, 140 new cases were found, while in mid 2023 from January to July 114 cases were found. With the soaring HIV/AIDS cases, the role of the Blitar Regency Government is needed to improve the health status of all members of the community. Prevention strategies and responsibilities of local governments with related groups and communities in accordance with their main tasks and functions in order to achieve maximum efforts to overcome HIV/AIDS and result in a decrease in HIV/AIDS cases.

The formulation of the problem in this study is: 1) How is the Implementation of the Legal Responsibility of the Blitar Regency Government regarding HIV/AIDS Control based on Ministerial Regulation Number 23 of 2022 concerning *Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immunodeficiency Syndrome* and Sexually Transmitted Infections? 2) What are the obstacles experienced by the Blitar Regency Government in the implementation of legal responsibilities regarding HIV/AIDS Control in Blitar Regency? 3) How is the implementation of the legal responsibility of the Blitar Regency Government regarding HIV/AIDS Control According to *Fiqh Siyasah*? The objectives of this study are: 1) To analyze the implementation of the legal responsibility of the Blitar Regency Government regarding HIV/AIDS Control Based on the Regulation of the Minister of Health Number 23 of 2022 concerning *Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immunodeficiency Syndrome* and Sexually Transmitted Infections. 2) To analyze the obstacles experienced by the Blitar Regency Government in the implementation of the legal responsibility of HIV/AIDS Control in the Regency Blitar. 3) To analyze the implementation of the legal responsibility of the Blitar Regency Government regarding HIV/AIDS Control according to *Fiqh Siyasah*.

The research method used is a qualitative method with a juridical-empirical approach. Data collection techniques use interviews, observations, and documentation. The data analysis technique uses Miles and Huberman data analysis, namely data reduction, data presentation and conclusion drawing and verification. Triangulation is used to check the validity of data.

The results of this study show that: 1) The implementation of the Legal Responsibility of the Blitar Regency Government in carrying out HIV AIDS Control has carried out several mandates in accordance with legal responsibility based on the Minister of Health Regulation Number 23 of 2022 concerning HIV, AIDS and STI Control, which is evidenced by carrying out epidemiological activities, surveillance, recording and reporting,

monitoring and evaluation, activities that improve services and Holding medical training, collaborating with non-governmental agencies, providing adequate infrastructure to provide health services. But there is one mandate that has not been carried out, namely there is no Regional Regulation or Regent Regulation related to HIV/AIDS control in Blitar Regency.

2) The obstacles experienced by the Regional Government of Blitar Regency in the implementation of the legal responsibility of the Blitar Regency Government regarding HIV AIDS management can be interms of services and the community. First, this aspect of services is in the form of logistical delays such as lack of thorough training for health workers and little budgeting. Second, in terms of society, there is still a thought that HIV AIDS treatment through alternative medicine and the stigma of community discrimination against ODHIV. 3) In the review of Fiqh siyasah, the implementation of the implementation of the legal responsibility of the Blitar Regency Government regarding HIV AIDS control in accordance with *Siyasah Tanfiziyyah* this is shown by *the siyasah tanfiziyyah* which discusses the relationship between leaders and their people. And the leader who regulates all public interests. The main purpose of all policies and actions of a leader is to create the best benefit of the people, as well as eliminate or minimize all forms of losses (*mafsadat*), by providing appropriate facilities and support mechanisms. If a leader does not pay attention to the interests of the people in a policy or decision, and does not try to find a way or mechanism to realize it, then his actions or decisions become false, and he must bear the consequences or risks. Therefore, HIV AIDS prevention activities in Blitar Regency are an important part of the Blitar Regency Government that is good and focuses on the interests of the community in the problem of HIV AIDS.

المخلص

إيفا دوي ليستاري .رقم القيد 126103203242، تنفيذ المسؤوليات القانونية لحكومة منطقة بليتار على محاولة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بناءً على اللائحة الوزارية رقم 23 لعام 2022 بشأن محاولة فيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسب والأمراض المنقولة جنسيًا، برنامج الدراسة القانون الدستوري، قسم الشريعة، كلية الشريعة وعلم الحكم، جامعة السيد علي رحمة الله الإسلامية الحكومية تولونج أجونج، 2024، المشرف: أمرين نور فيني، الماجستير.

الكلمات الرئيسية: المسؤولية القانونية، الحكومة الإقليمية، محاولة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

خلفية هذا البحث هي الارتفاع الكبير في حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في منطقة بليتار خلال عام 2022، حيث تم العثور على 140 حالة جديدة، بينما تم العثور على 114 حالة في منتصف عام 2023 من يناير إلى يوليو. ومع تزايد حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، أصبح الدور الذي تضطلع به حكومة منطقة بليتار ضروريا لتحسين الوضع الصحي لجميع أفراد المجتمع. وتتوافق استراتيجيات الوقاية ومسؤوليات الحكومات المحلية مع المجموعات ذات الصلة والمجتمع مع مهامها ووظائفها الرئيسية من أجل تحقيق أقصى قدر من الجهود للتغلب على فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والتسبب في انخفاض حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

يركز هذا البحث على: (1) كيف تنفيذ حكومة منطقة بليتار مسؤولياتها القانونية على محاولة فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز بناءً على اللائحة الوزارية رقم 23 لعام 2022 بشأن فيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسب والأمراض المنقولة جنسيًا؟ (2) ما العقبات التي تواجهها حكومة منطقة بليتار في تنفيذ مسؤولياتها القانونية على محاولة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في منطقة بليتار؟ (3) كيف تنفيذ المسؤوليات القانونية لحكومة منطقة بليتار على محاولة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وفقا لفقہ السياسة؟ أهداف هذا البحث هي: (1) تحليل تنفيذ المسؤوليات القانونية لحكومة منطقة بليتار على محاولة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بناءً على لائحة وزير الصحة رقم 23 لعام 2022 بشأن فيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسب والأمراض المنقولة جنسيًا. (2) تحليل العقبات التي تواجهها حكومة منطقة بليتار في تنفيذ مسؤولياتها القانونية للتعامل مع فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في منطقة بليتار. (3) تحليل تنفيذ المسؤوليات القانونية لحكومة منطقة بليتار على محاولة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وفقا لفقہ السياسة.

طريقة البحث المستخدمة هي طريقة كيفية بالمنهج القانوني التجريبي. تستخدم طرق جمع البيانات المقابلة والملاحظة والوثائق. تستخدم طرق تحليل البيانات تحليل بيانات مايلز وهوبرمان، أي تقليل البيانات وعرض البيانات واستخلاص النتائج والتحقق واستخدام التثليث للتحقق من صحة البيانات.

تظهر نتائج هذا البحث أن: (1) تنفيذ المسؤوليات القانونية لحكومة منطقة بليتار في تنفيذ محاولة فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز قد نفذت عدة ولايات وفقاً للمسؤوليات القانونية بناءً على لائحة وزير الصحة رقم 23 لعام 2022 بشأن محاولة فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز والأمراض المنقولة جنسياً، والتي إثباتها من خلال القيام بالأنشطة الوبائية والمراقبة والتسجيل والإبلاغ والرصد والتقييم، وأنشطة تحسين الخدمات وتوفير التدريب الطبي، والتعاون مع الهيئات غير الحكومية، وتوفير البنية التحتية الكافية لتقديم الخدمات الصحية. ومع ذلك، هناك ولاية واحدة لم تنفذها، وهي عدم وجود لائحة إقليمية أو لائحة ريجنت على بالوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في منطقة بليتار. (2) العقبات التي تواجهها الحكومة الإقليمية لمنطقة بليتار في تنفيذ المسؤوليات القانونية لحكومة منطقة بليتار على بالوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز يمكن أن تكون من حيث الخدمات والمجتمع. أولاً، يأتي هذا الجانب من الخدمة في شكل تأخيرات لوجستية مثل عدم التدريب الشامل للعاملين في مجال الصحة وقلة الميزانية. ثانياً، من منظور مجتمعي، يأتي ذلك في شكل اعتقاد بأن علاج فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز من خلال الطب البديل ووصمة التمييز المجتمعي ضد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية. (3) عند مراجعة فقه السياسة، فإن تنفيذ المسؤوليات القانونية لحكومة منطقة بليتار على محاولة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز يتوافق مع السياسة التنفيذية، ويتجلى ذلك في السياسة التنفيذية التي تناقش العلاقة بين القادة وشعوبهم. والقائد الذي يدير كافة المصالح العامة. الهدف الرئيسي لجميع سياسات وتصرفات القائد هو خلق أفضل فائدة ممكنة للشعب، وكذلك القضاء على جميع أشكال الخسارة (المفصلات) أو تقليلها، من خلال توفير المرافق المناسبة وآليات الدعم. إذا لم يلتفت القائد إلى مصلحة الشعب في سياسة أو قرار ما، ولم يحاول إيجاد طريقة أو آلية لتحقيق ذلك، فإن فعله أو قراره سيكون باطلاً، وعليه أن يتحمل العواقب أو القرار. المخاطر. لذا فإن أنشطة الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز في منطقة بليتار هي جزء مهم من حكومة منطقة بليتار الجيدة وتركز على مصالح المجتمع في مشكلة فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز.